
IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK (PGP) DI KABUPATEN SUMEDANG

Arip Rahman Sudrajat^{1*}, Adithya Kusuma Ramdhani², Dadan Nurpalah³, Imelda Amanda Soleha⁴,
Rani Meilani⁵, Sanindah⁵

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Sept 12, 2024

Revised Des 12, 2024

Accepted Des 20, 2024

Keywords:

Public Policy

Public Policy Implementation

Driving Teacher Education

Program

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out, obtain objective data and information about the Implementation of the Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Program in Sumedang District. The method used in this research is descriptive analysis with a qualitative approach. The research determination technique is purposive sampling. The research informants include the Head of the PGP program committee, the Finance Division of the PGP program committee, and the Program Division of the PGP program committee. The data collection techniques used are literature review and field studies consisting of observation, interviews and documentation. While the data processing procedures in this study are data reduction, data display, and data conclusion drawing/verification. Based on the research results, it can be described that the implementation of the PGP program has gone well but is still not optimal due to several obstacles, including factors such as poor information, lack of teacher motivation and understanding regarding the PGP program, and restrictions on the quota of participants who take part in each program. class, which causes several members who have graduated to have to "park" first because of the limited quota. The suggestions for this PGP program are establishing collaboration, using multi-channel communication, and holding forums or regular meetings to share experiences and inspiration between teachers.



Copyright © 2024 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Arip Rahman Sudrajat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No 19 Kelurahan Situ - Sumedang

Email: ariprahmans@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Adanya perkembangan teknologi dalam beberapa waktu tahun terakhir ini memberikan banyak terobosan dalam teknologi informasi dan komunikasi, contohnya seperti internet, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things* yang telah mengubah cara bekerja, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Selain itu, perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi berbagai sektor salah satunya adalah pada sektor pendidikan.

Perkembangan teknologi ini membuka pintu menuju pendidikan yang lebih interaktif, terjangkau, dan dapat diakses secara global. Adanya platform pembelajaran *online*, aplikasi, dan platform digital lainnya dalam proses pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Teknologi juga memungkinkan personalisasi pembelajaran, pemantauan belajar siswa, dan penggunaan sumber daya pendidikan yang lebih kaya. Namun demikian, dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, tentunya ada hambatan atau tantangan yang dihadapi baik oleh siswa maupun guru sebagai tenaga pendidik itu sendiri.

Permasalahan seperti adanya siswa yang tidak memahami pembelajaran membuat guru harus mengubah cara mengajarnya dengan sekreatif mungkin agar membuat siswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan. Hal itu tentunya menjadi tantangan bagi pendidik sendiri. Guru harus bisa memahami kebutuhan dari setiap siswa dan menyusun pembelajaran yang sesuai. Hal ini tentunya membutuhkan pendekatan yang berbeda tergantung pada kemampuan dan minat dari siswa tersebut. Guru juga harus mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Hal ini memerlukan pemahaman dan keterampilan teknologi yang lebih dalam. Dalam konteks ini, perlu bagi guru untuk mengembangkan keterampilan dan kreatifitas mereka agar pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Melihat dari permasalahan tersebut, pemerintah sudah sewajarnya membuat suatu program yang dapat terealisasi dengan baik sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan diadakannya pelatihan bagi guru untuk meningkatkan proses mengajarnya agar siswa tidak jenuh saat belajar dan lebih memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut.

Menurut data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, pemerintah membuat sebuah program yaitu Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) yang merupakan salah satu langkah strategis dari pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan guru yang berdaya dan memberdayakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik.

Program PGP diselenggarakan dalam rangka memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing. Rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ditunjukkan melalui sikap dan emosi positif terhadap satuan pendidikan, bersikap positif terhadap proses akademik, merasa senang mengikuti kegiatan di satuan pendidikan, terbebas dari perasaan cemas, terbebas dari keluhan kondisi fisik satuan pendidikan, dan tidak memiliki masalah sosial di satuan pendidikannya.

Program PGP memerlukan koordinasi yang terstruktur dan sistematis dari setiap elemen pendukungnya, antara lain Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Direktorat P3GTK, Balai Besar Guru Penggerak, Dinas Pendidikan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Narasumber, Fasilitator, dan Pengajar Praktik.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, sasaran dari program ini meliputi guru pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Dengan kualifikasi diantaranya sebagai berikut:

1. berstatus sebagai Guru;
2. memiliki kualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV;
3. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun;
4. memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
5. terdaftar pada Data Pokok Pendidikan Kementerian;
6. tidak sedang terdaftar dan berperan sebagai:
 - a. Pengajar Praktik pada Pendidikan Guru Penggerak;
 - b. Asesor pada Pendidikan Guru Penggerak atau PSP;
 - c. Fasilitator pada Pendidikan Guru Penggerak atau PSP; dan/atau
 - d. Instruktur pada Pendidikan Guru Penggerak.
7. mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung.

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan program PGP diantaranya seperti dimulai dari adanya seleksi yaitu seleksi administrasi dan seleksi substansi, pembelajaran yang dilakukan secara daring dan luring, penilaian, sampai pada pemberian sertifikat Guru Penggerak. Sertifikat Guru Penggerak ini dapat digunakan

untuk pemenuhan salah satu persyaratan sebagai kepala sekolah, pengawas sekolah, atau penugasan lain di bidang pendidikan.

Calon Guru Penggerak (CGP) menjalankan proses pendidikan selama 6 bulan yang terdiri dari pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran daring berlangsung selama 6 bulan dengan 3 paket modul yang wajib dipelajari oleh Calon Guru Penggerak. Pendampingan terdiri dari lokakarya dan pendampingan individu yang akan dilaksanakan setiap bulan selama 6 bulan. Kegiatan Lokakarya merupakan salah satu bentuk dan kesempatan para CGP bertemu dengan para pengajar praktik.

Di Kabupaten Sumedang sendiri program ini sudah berjalan selama 4 (empat) periode atau lamanya sudah dua tahun berjalan. Dimulai dari angkatan 5, 7, 8, dan angkatan 9. Jumlah peserta yang mengikuti program ini setiap periode berbeda-beda sesuai dengan kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat. Berikut adalah data jumlah peserta program PGP pada setiap angkatannya:

Tabel 1. Jumlah Peserta Program

ANGKATAN	JUMLAH PESERTA
Angkatan 5	155
Angkatan 6	132
Angkatan 8	20
Angkatan 9	113
TOTAL PESERTA	420

Sumber: Laporan Kegiatan Program Pendidikan Guru Penggerak

Jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan guru yang mengikuti program ini mulai dari guru tingkat PAUD, TK, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Ini sangat masih jauh dengan jumlah guru di Kabupaten Sumedang yang berjumlah 11.927 guru yang terdaftar di Dapodik. Berikut adalah data guru di Kabupaten Sumedang yang terdaftar di Dapodik:

Tabel 2. Jumlah Guru di Kabupaten Sumedang

Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah Guru
TK	6	611	617
SD	1.793	4.199	5.992
SMP	957	1.437	2.394
SMA	430	587	1.017
SMK	789	794	1.583
SLB	93	231	324
TOTAL			11.927

Sumber: *Website* Dapodik Kemendikbudristek 2023

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa angka partisipasi guru dalam program PGP ini masih rendah. Hal ini disebabkan masih adanya guru yang enggan atau kurang berminat untuk mengikuti program ini berpandangan bahwa guru yang mengikuti program ini akan diangkat sebagai kepala sekolah. Maka dari itu, perlu adanya pemahaman kepada guru terkait program PGP untuk meningkatkan partisipasi dari guru untuk keberhasilan dalam pelaksanaan program PGP tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang membuat panitia yang bertugas dalam pelaksanaan program ini, dimulai dari sosialisasi, seleksi sampai pelaporan. Pemilihan panitia yang bertugas dalam program ini disesuaikan dengan jumlah peserta yang berpartisipasi dalam program ini, jadi jumlah panitia yang bertugas dalam program PGP dalam setiap periode nya akan berbeda.

Dinas Pendidikan juga berkolaborasi dengan pihak terkait lainnya seperti pihak sekolah dan universitas untuk berjalannya program PGP ini. Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang juga memberikan laporan langsung kepada pusat secara *online* terkait dengan jalannya program tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Kegiatan Lokakarya 5 Program PGP Angkatan ke-8, terdapat total 29 orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, berikut adalah data partisipasi tersebut:

Tabel 3. Unsur yang Terlibat dalam Program PGP

No	Unsur yang Terlibat	Jumlah
1	Pengajar Praktik	3
2	Calon Guru Penggerak (CGP)	20
3	Panitia Dinas Pendidikan (Penanggung jawab kegiatan, Ketua pelaksana, anggota panitia)	4
4	Penceramah (Dinas Pendidikan Kab/Kota)	1
5	Undangan KCD (Dinas Pendidikan Provinsi)	1
TOTAL		29

Sumber: Laporan Lokakarya 5 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 2023

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah CGP yang mengikuti program PGP di angkatan 8 ini lebih sedikit dari angkatan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan kuota dari pusat terkait jumlah peserta yang dapat mengikuti program PGP ini. Adanya pembatasan kuota ini disesuaikan dengan besaran anggaran yang akan dikeluarkan pada masing-masing daerah terkait yang melaksanakan program PGP. Selain itu, masih terdapat peserta PGP yang sudah lulus seleksi tapi masih “parkir” karena pembatasan kuota tersebut.

Hal ini dapat berakibat pada peserta yang ingin mengajukan diri sebagai kepala sekolah atau pun pengawas akan tetapi belum mendapat sertifikat Guru Penggerak karena masih parkir, maka pengajuannya untuk menjadi kepala sekolah tidak dapat diterima karena salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas adalah harus mempunyai sertifikat Guru Penggerak.

Berdasarkan hasil pengamatan dan observasi awal yang dilakukan, dapat ditarik beberapa fokus permasalahan mengenai Implementasi Program Pendidikan Guru Penggerak di Kabupaten Sumedang, diantaranya:

1. Rendahnya minat dan motivasi guru untuk mengikuti program guru penggerak. Hal ini dilihat dari masih terbatasnya guru yang mengikuti program ini dikarenakan ada beberapa guru yang tidak mau diangkat menjadi kepala sekolah.
2. Kurangnya fasilitas dari Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan sosialisasi program guru penggerak. Hal ini dilihat dari tidak adanya tempat yang tetap untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut.
3. Masih lemahnya komunikasi dan koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dengan pihak terkait. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber bahwa terdapat beberapa wilayah yang tidak dapat diajak kolaborasi dalam pelaksanaan program.

2. METHOD

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif atau *qualitative research* merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam konteks, dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, yang berbeda dengan lainnya karena berbeda konteksnya.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini diharapkan data yang didapat lebih lengkap serta bermakna dan pasti, hal ini disesuaikan dengan pendapat yang dikemukakan Sugiyono (Azizah, 2019) yaitu bahwa dengan digunakannya metode kualitatif, maka data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penggunaan metode kualitatif ini, bukan karena metode ini baru dan lebih ‘trendy’, tetapi memang permasalahan lebih tepat dicarikan jawabannya dengan metode kualitatif.

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat diperoleh data yang lebih tuntas, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus yang diamati adalah implementasi program dan faktor yang mempengaruhi program pendidikan guru penggerak di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Metode kualitatif yang digunakan ini diharapkan dapat membantu dalam proses mengumpulkan data serta informasi yang lebih jelas serta akurat yang memberikan kredibilitas yang tinggi agar tercapainya tujuan dari penelitian.

Menurut Sugiyono (2022: 80-81) menyebutkan bahwa Populasi diartikan sebagai “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya” sedangkan Sampel adalah “Sebagian dari populasi tersebut.” Informan dalam penelitian ini adalah panitia dari Dinas Pendidikan dalam program Pendidikan Guru Penggerak yang benar-benar mengetahui dan memahami permasalahan terkait program tersebut.

Tabel 4. Informan Penelitian

NO	Unsur	Jumlah (Orang)
1	Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	1
2	Pelaksana pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	2
Jumlah		3

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, pegawai yang dijadikan sampel informan penelitian dikarenakan berdasarkan pertimbangan peneliti, bahwa sampel informan peneliti yang bersangkutan tersebut dianggap mampu, berkompeten dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program guru penggerak di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Selanjutnya pengolahan data dilakukan melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi program adalah pelaksanaan atau penerapan dari suatu kegiatan yang sudah direncanakan dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi Program Pendidikan Guru Penggerak diselenggarakan dalam rangka memberikan bekal kemampuan kepemimpinan pembelajaran dan pedagogi kepada guru sehingga mampu menggerakkan komunitas belajar, baik di dalam maupun di luar sekolah serta berpotensi menjadi pemimpin pendidikan yang dapat mewujudkan rasa nyaman dan kebahagiaan peserta didik ketika berada di lingkungan sekolahnya masing-masing. Implementasi program Pendidikan Guru Penggerak merupakan salah satu langkah dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan yang dilakukan oleh guru (CGP) yang bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan guru dan meningkatkan proses pembelajaran guru terhadap peserta didik.

Untuk mengetahui Implementasi Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) di Kabupaten Sumedang, peneliti menggunakan alat ukur sebagai acuan dalam mengukur implementasi program menurut Korten (Sudrajat, Yuliana dan Nurmalasari, 2021: 59) sebagai berikut:

1. Program
2. Organisasi Pelaksana
3. Kelompok Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil keseluruhan implementasi program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Wawancara Mengenai Implementasi Program Pendidikan Guru Penggerak di Kabupaten Sumedang

Fokus permasalahan	Dimensi	Kesimpulan
Menurut Korten (Sudrajat, Yuliana, dan Nurmalasari, 2021: 59) dimensi Implementasi program.	Program.	Menunjukkan adanya tujuan yang jelas dalam pengimplementasian program PGP ini, dengan tujuan sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak, terdapat kebijakan yang mendukung dalam pembentukan program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) ini, salah satunya adalah dengan adanya peraturan tentang pengangkatan kepala sekolah atau pengawas sekolah yang memerlukan sertifikat guru penggerak.
	Organisasi Pelaksana	dalam sosialisasi yang dilakukan melibatkan berbagai tahap mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah, hingga para guru atau calon guru penggerak. Selain itu, metode sosialisasi juga mencakup pendekatan online dan juga offline. Program PGP (Pendidikan Guru Pembelajar) juga menunjukkan kemajuan sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat.

	Kelompok Sasaran	Partisipasi guru sebagai kelompok sasaran dari program PGP ini sudah cukup baik, hal ini dilihat adanya semangat dari para peserta dalam mengikuti kegiatan ini, selain itu para guru juga berinteraksi dengan baik satu sama lain dengan guru lainnya maupun dengan panitia.
--	------------------	---

Sumber: Hasil Wawancara yang dilakukan di Dinas Pendidikan dan SDN Panyingkiran I, 2023

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai implementasi program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Kabupaten Sumedang. Program menunjukkan adanya tujuan yang jelas dalam pengimplementasian program PGP ini, dengan tujuan sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak, terdapat kebijakan yang mendukung dalam pembentukan program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) ini, salah satunya adalah dengan adanya peraturan tentang pengangkatan kepala sekolah atau pengawas sekolah yang memerlukan sertifikat guru penggerak.

Kemudian dimensi organisasi pelaksana, dalam sosialisasi yang dilakukan melibatkan berbagai tahap mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah, hingga para guru atau calon guru penggerak. Selain itu, metode sosialisasi juga mencakup pendekatan *online* dan juga *offline*. Program PGP (Pendidikan Guru Pembelajar) juga menunjukkan kemajuan sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah pusat. Panitia pelaksana juga merespon dengan baik terhadap umpan balik dan masukan yang diberikan.

Kelompok pelaksana dalam hal ini adalah guru sudah berpartisipasi dengan cukup baik dalam pelaksanaan program PGP, hal ini dilihat adanya semangat dari para peserta dalam mengikuti kegiatan ini, selain itu para guru juga berinteraksi dengan baik satu sama lain dengan guru lainnya maupun dengan panitia.

Hal tersebut diatas sudah dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan implementasi program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) diatas sudah dikatakan maksimal dan tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Dalam pelaksanaan implementasi program Pendidikan Guru Penggerak di Kabupaten Sumedang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selalu ada saja hal-hal atau faktor-faktor yang dapat menghambat atau mengganggu dalam implementasi program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) tersebut. Faktor-faktor ini dapat membuat proses implementasi program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) tidak optimal.

Pada penelitian ini faktor penghambat implementasi program Pendidikan Guru Penggerak di Kabupaten Sumedang, peneliti merujuk pada dimensi-dimensi faktor yang menghambat implementasi program menurut Korten (Sudrajat Yuliana dan Nurmalasari, 2021:57).

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor penghambat implementasi program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) di Kabupaten Sumedang. Untuk faktor-faktor isi kebijakan panitia pelaksana memahami kebijakan mengenai program Pendidikan Guru Penggerak dengan menerapkan kebijakan tersebut dalam pelaksanaan program PGP sehingga tidak menjadi faktor hambatan isi kebijakan, faktor informasi kurang baik hal ini karena jarak dan lokasi yang tidak mendukung dalam penjangkauan internet sehingga membuat penyampaian informasi kurang optimal, serta dalam faktor dukungan kurang baik hal ini dikarenakan kurangnya motivasi dan pemahaman guru terkait dengan program PGP dan adanya pembatasan kuota peserta yang mengikuti program tiap angkatannya yang menyebabkan beberapa anggota yang sudah lulus harus “parkir” terlebih dahulu karena kuota yang terbatas tersebut.

Dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan program PGP yang baik dan optimal, diperlukan upaya-upaya yang dapat mengatasi hambatan dari implementasi program PGP tersebut. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Berlandaskan kepada hambatan diatas pada implementasi program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Kabupaten Sumedang, maka dalam upaya untuk mengatasi hambatan tersebut merujuk kepada teori yang disampaikan oleh Korten (Sudrajat, Yuliana dan Nurmalasari, 2021:57).

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai upaya-upaya untuk mengatasi hambatan implementasi program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) di Kabupaten Sumedang, yaitu diadakannya rapat secara teratur, diadakannya sosialisasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta PGP. Selain itu, dibuatkannya grup *WhatsApp* yang ditujukan untuk para peserta dan panitia agar lebih mudah berkomunikasi, serta melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan informasi diterima dengan baik dan jelas. Hal lain seperti menyelenggarakan bimtek-bimtek untuk para peserta PGP, meningkatkan kapasitas SDM yang ada dengan jenjang karier, serta melakukan monitoring

yang fokus pada pentingnya program bagi pendidikan serta melakukan sosialisasi yang lebih luas dengan menyebarkan informasi melalui media daring

4. CONCLUSION

Implementasi implementasi program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) Kabupaten Sumedang menunjukkan adanya tujuan yang jelas dalam pengimplementasian program PGP ini, dengan tujuan sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Guru Penggerak, terdapat kebijakan yang mendukung dalam pembentukan program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) ini, salah satunya adalah dengan adanya peraturan tentang pengangkatan kepala sekolah atau pengawas sekolah yang memerlukan sertifikat guru penggerak.

Faktor penghambat dalam implementasi program Pendidikan Guru Penggerak yaitu dalam faktor informasi yang kurang baik hal ini karena jarak dan lokasi yang tidak mendukung dalam penjangkauan internet sehingga membuat penyampaian informasi kurang optimal, serta dalam faktor dukungan kurang baik hal ini dikarenakan kurangnya motivasi dan pemahaman guru terkait dengan program PGP dan adanya pembatasan kuota peserta yang mengikuti program tiap angkatannya yang menyebabkan beberapa anggota yang sudah lulus harus “parkir” terlebih dahulu karena kuota yang terbatas tersebut.

Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan implementasi program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) di Kabupaten Sumedang, yaitu diadakannya rapat secara teratur, diadakannya sosialisasi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta PGP. Selain itu, dibuatkannya grup WhatsApp yang ditujukan untuk para peserta dan panitia agar lebih mudah berkomunikasi, serta melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan informasi diterima dengan baik dan jelas. Hal lain seperti menyelenggarakan bimtek-bimtek untuk para peserta PGP, meningkatkan kapasitas SDM yang ada dengan jenjang karier, serta melakukan monitoring yang fokus pada pentingnya program bagi pendidikan serta melakukan sosialisasi yang lebih luas dengan menyebarkan informasi melalui media daring.

REFERENCES

- Agustiani, T. (2021). *Pengertian Program*. Diakses dari <https://jurnal-tia-agustiani.medium.com/pengertian-program-6a853ee8331c>
- Azizah, W. A. (2019). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Jaminan Sosial di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang. Sumedang: STIA Sebelas April Sumedang.
- Handoko, H. (2017). *Manajemen*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hoeriah, Riski (2019). Implementasi Program kampung Keluarga Berencana (KB) di Kampung Kaliwadus Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Kugraha, A. F. (2014). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Serang. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Manao, M. M., Sijabat, O. P., Situmorang, A. R., Hutauruk, A., & Panjaitan, S. (2022). Mengatur Kualitas Guru Melalui Guru Penggerak. *Journal of Educational Learning and Innovation*.
- Mufiz, A. (2016). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi*. eds. Kurniawan Rudi, Bobby Rahman, and Iskandar Hadi. Sulawesi: Unimal Press.
- Nurjannah, Hutamy, E. T., Nirmala, Nirmalasari, P., & Lestari, A. (2023). Guru Penggerak Sebagai Bentuk Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, U. (2020). *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensinda.
- Sudrajat, A. R., Yiuliana, M., & Nurmalsari. (2021). Implementasi Program Pembinaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumedang. *Journal of Regional Public Administration (JRPA)*.
- Sugiyono, 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I. K. (2020). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.